

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrianto, Nico. 2017. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang
- Khanisa. 2015. Indikator transparansi pengelolaan keuangan
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali
- Pasolong, H (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pujileksono, Sugeng. (2015) *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang, Intrans Publishing
- Sabarno, Hari. 2017. *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dkk. (2006). *Metode penelitian social*, Jakarta: Kencana.

Jurnal :

- Firdaus, R. (2022). *Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara*. *Public Administration Journal*. Vol. 5 No. 1 1-9.
- Hanoatubun, S., 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1): 146-153.
- Herdiana, D. Wahidah, I. Nuraeni, N. Salam, A.N. (2021). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan*. *Jurnal Inspirasi*. Vol. 12 No.1 1-17.

- Iskandar, A., Possumah, B.T., Aqbar, K., 2020, Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7(7): 625-638.
- Mardiasno. 2016. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2 : 1. (1-17).
- Mita, R. (2015). Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol 11 no 2.
- Rufiah, M, D., Aida, Y., & Rifa, M. (2022). Pengaruh Transparansi dan akuntabilitasi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dan desa di Kab Bireuen. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Universitas Syah Kuala, Vol 10 no 2.
- Titiek, I., Widya, A., & Siti, F, U. (2021). Upaya pencegahan dan menekan penyebaran covid-19 dengan sosialisasi protokol kesehatan 4m kepada masyarakat desa gayaman kec. Mojoanyar kab. Mojokerto. *Journal of Community Engagement in Health*, STIKes Dian Husada, Mojokerto, Indonesia AKBID Ar Rahma, Indonesia, Vol 4 no 1.
- Wahya, I. (2020). Persidangan pidana secara online, respon cepat ma hadapi pandemi covid-19. *Jurnal Hakim Pengadilan Negeri Wamena*, Papua, Vol 6 no1.

Skripsi :

- Ade Novianti. (2021). Transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) covid-19 di desa Patani Kab Takalar, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Bambang Widoto. (2021). Tranparansi kebijakan bantuan langsung tunai di desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab Pelalawan, Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Riva Zaura. (2022). Implementasi program bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-DD) kepada penduduk miskin terdampak COVID-19 Tahun 2020. Skripsi. Universitas Malikussaleh.

Website :

- Krina, Loina Lalolo. 2013. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta : Sekretariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Ringkasan kebijakan pengutamaan penggunaan dana Desa. Unit Riset Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 1-8.

Peraturan/UUD :

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2021 tentang pengeolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Keungan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Diease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.